

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan Badan yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Pengembangan Data dan Informasi Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan, Program Kerjasama Pembangunan, dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2020.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E).
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor selama Tahun 2020 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 dan Capaian Renstra Bappeda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai Badan Perencana dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan warga kota.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan perencanaan pada Kota Bogor pada Tahun 2018 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

Program - program yang dilaksanakan Bappeda Kota Bogor sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penelitian dan Pengembangan
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pengembangan Data dan Informasi
8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
9. Program Kerjasama Pembangunan
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Perencanaan Tata Ruang

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda

Bappeda Kota Bogor pada tahun 2018 telah melaksanakan 12 (duabelas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pada Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1.088.500.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 929.840.525,- (85.42%), meliputi kegiatan :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Realisasasi Anggaran
A	Belanja Pegawai		
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	Staf PPTK	12.000.000
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	PPK, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa	5.625.000
3	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Honorarium Supir	22.250.000
B	Belanja Barang Dan Jasa		
1	Belanja ATK	Item Barang	76.843.663
2	Alat Listrik Dan Elektronik	Item Barang	13.298.000

No.	Uraian	Jumlah Barang	Realisasasi
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	Kendaraan Roda Empat 6 Unit	54.638.286
4	Belanja Pengisian Tabung Gas	Tabung Gas Besar 12 Kg @ 1 Unit	1.700.000
5	Belanja Dokumen/Dekorasi	Spanduk, Bendera Dan Umbul-Umbul	4.400.000
6	Belanja Peralatan Dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	item Barang	6.735.000
7	Belanja Jasa Kantor	Rekening Telpon,Air, Listrik, Surat/Majalah	145.483.976
8	Belanja Jasa Kebersihan	4 Orang tenaga Kebersihan Dan Peralatan/Perlengkapan Kebersihan	173.960.000
9	Belanja Jasa Keamanan	4 Orang tenaga Keamanan Dan Peralatan /Perlengkapan Keamanan	194.000.000
10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Belanja STNK Roda Empat 10 Unit Dan Roda Dua 15 Unit	11.381.600
11	Belanja Cetak		21.885.000
12	Belanja Penjilidan	Jilid Buku	4.500.000
13	Belanja Makanan Dan Minuman	Jamuan Ringan Dan Jamuan Makan Tamu Dan Rapat	114.029.000

No.	Uraian	Jumlah Barang	Realisasasi
14	Belanja Pakaian Dinas	Pakaian PDH dan Pakaian Olahraga	48.411.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola sarana prasarana aparatur yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

1. Pengadaan Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya sarana dan prasarana Inventaris Kantor dilingkungan Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.135.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.272.000,- (93,68%), meliputi pengadaan :

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
A	BELANJA PEGAWAI		
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	Staff PPTK	1.800.000
B	BELANJA MODAL		
1	BM Pengadaan Mesin Penghancur	2 unit	3.450.000
2	BM.Pengadaan Kendaraan Roda 2	5 Unit	88.450.000
3	BM.Pengadaan Filling Kabinet 4 Laci	12 Unit	40.888.680
4	BM Pengadaan Televisi	4 Unit	52.515.000

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
5	BM.Pengadaan Peralatan dan Mesin- Pengadaan Mebelair	1 paket	151.867.680
6	BM.Pengadaan Ac 1 dan 2 PK	14 Unit	130.600.500
7	BM. Pengadaan Alat Rumah tangga Lainnya	1 paket	137.586.900
8	BM. Pengadaan Komputer	5 Unit	201.059.460
9	BM Pengadaan Mesin Tik	3 Unit	8.998.110
10	BM. Peralatan Komputer Mainframe	1 paket	48.664.040
11	BM.Pengadaan Scanner	2 Unit	37.900.000
12	BM. Pengadaan Kursi Kerja	1 paket	131.043.800
13	BM Pengadaan Monitor 24 “	6 Unit	14.325.480
14	BM pengadaan kamera	1 Unit	4.125.000
15	BM.Pengadaan Peralatan Jaringan	1 Unit	9.997.350

2. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpeliharanya sarana dan prasarana Inventaris Kantor dilingkungan Bappeda Kota Bogor, kegiatan dimaksud dianggarkan sebesar Rp. 1.469.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.307.723.300,- (89,02%) meliputi :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Realisasasi Anggaran
A	Belanja Pegawai		
1	Honorarium	PPTK Dan Staf PPTK	22.200.000

No.	Uraian	Jumlah Barang	Realisasasi
	Pelaksana Kegiatan		
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	PPK, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000
B	Belanja Barang dan Jasa		
1	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat 10 Unit Dan Kendaraan Roda Dua 15 Unit	144.850.000
2	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Kendaraan Roda Empat 10 Unit Dan Kendaraan Roda Dua 15 Unit	205.504.300
3	Terpeliharanya Bangunan/Gedung	Renovasi Ruang kepala Bappeda , Renovasi Kamar Mandi Dan Biaya Pengawasan Dan Konsultasi Bangunan	839.599.000
4	Jasa Konsultan	Perencanaan dan pengawas	93.170.000

C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD dilaksanakan selama dua triwulan atau 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret dan Oktober sampai dengan Desember 2018. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.788.341.-



Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusun dokumen Rencana Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen
- 2) Tersusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen
- 3) Tersusun dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Bappeda Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen
- 4) Tersusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersedia dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogo

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	NA	60	247
	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	30%	100%
	Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	NA	3	12

Dengan Keegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kegiatan ini merupakan amanah dari Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem



Inovasi Daerah. Dengan biaya sebesar Rp.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 444.644.550,-.

Tahun 2018 Pemerintah Kota Bogor meraih peringkat ke- 8 dari seluruh Kabupaten/Kota se- Indonesia dalam Penghargaan Inovative Government Award yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dikategorikan dalam Kota sangat Inovatif.

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Identifikasi Hasil Litbang dan Inovasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah

Dari identifikasi hasil litbang dan Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah teridentifikasi sebanyak 247 inovasi yang terdiri dari 12 Inovasi tata kelola Pemerintahan, 30 Inovasi pelayanan publik dan 205 inovasi bentuk lainnya (beberapa contoh inovasi bentuk lainnya : Inovasi program Sekolah Ibu, Inovasi Produk Gula Cair GUCAKUSI, Inovasi Produk Daur Ulang Kertas) 247 Inovasi tersebut sebanyak 128 inovasi dihasilkan dari Perangkat Daerah, 48 inovasi dihasilkan dari Lembaga Penelitian, 27 inovasi dihasilkan dari dunia pendidikan dan 44 inovasi dihasilkan dari masyarakat.

- 2) Dokumen Identifikasi Perdagangan dan Jasa Unggulan di Kota Bogor.

Kawasan Perdagangan dan jasa existing di Kota Bogor sebagian besar berada di sepanjang jalan utama, dimana dari hasil identifikasi ditemukan 50 koridor kawasan perdagangan dan jasa yang dibagi dalam 3 kategori yaitu : 7 koridor kawasan unggulan, 11 koridor kawasan potensial dan 32 koridor kawasan terbatas. Jenis usaha di kawasan perdagangan dan jasa paling banyak di dominasi oleh usaha kuliner, jasa keuangan, fashion, perlengkapan rumah tangga, otomotif, minimarket dan hotel.

3) Dokumen Penyusunan Rancang Lanskap 7 Kelurahan Peserta Lomba Inovasi Rancang Kampung Tematik.

- Tema yang diusung untuk masing-masing kelurahan adalah : Kampung Agro Eduwisata Organik Kelurahan Mulyaharja, Kampung Ekowisata dan Bisnis Margajaya, Kampung Juara dan Wisata Katulampa, Kampung Semut Kroto Kelurahan Cikaret, Kampung Wisata Kesenian Marawis Kelurahan Semplak, Kampung Konservasi Sejahtera Mandiri Kelurahan Kedung Waringin dan Kampung Wisata Taman Pelangi Kelurahan babakan Pasar. Ketujuh Kelurahan tersebut memiliki potensi untuk di tata sebagai kawasan wisata dengan klasifikasi yang relatif beragam sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut.
- Manfaat Pengembangan Kampung Tematik meliputi skala kota dan skala kelurahan. Untuk skala Kota : menambah jumlah destinasi wisata kota yang berbasis pada masyarakat setempat, meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat pengembangan Green City, Smart City dan Heritage City. Sakal Kelurahan : perbaikan kawasan dan lingkungan kelurahan, Peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- Tujuan penyusunan rancang lanskap adalah menginventarisasi dan pemetaan awal, menyusun rencana lanskap dalam bentuk grafis peta berskala 1:2000 s/d 1 : 4000, serta menyusun rancang lanskap detail pada bagian- bagian khusus skala 1 : 50 s/d 1:200

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terlaksananya Rekomendasi Roadmap Sistem Informasi Daerah Kota Bogor

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan pengiriman data dari Perguruan Tinggi dan Lembaga kelitbangan terkait hasil kelitbangan dan inovasi yang dihasilkan, sementara waktu penyusunan dokumen sudah selesai sehingga data tambahan yang masuk dijadikan sebagai tambahan lampiran.
- 2) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 masih dalam proses pembahasan dengan DPRD sehingga kedalaman materi untuk rekomendasi menjadi kurang matang.
- 3) Status tanah yang akan disusun dalam rancang lanskap merupakan tanah masyarakat dan sebagian milik PT, sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam menyusun rancang lanskap kampung tematiknya.

E. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Targe t 2018	Capaian 2018
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	80%	95%	95 %

Dengan Kegiatannya sebagai berikut:

1. Review Masterplan Drainase

Pada tahun 2007 sudah dilakukan kegiatan penyusunan Masterplan Drainase yang berisikan 15 Zona dari sungai dan anak sungai, kemudian pada tahun 2013 dilakukan outline plan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor yang menghasilkan



beberapa penjelasan detail mengenai penanganan banjir dan pembangunan saluran drainase. Lalu pada tahun 2014 dilakukan Review Masterplan Drainase pada Bappeda Kota Bogor dan menghasilkan dokumen hingga laporan pendahuluan, sehingga perlu dilanjutkan dalam Review Masterplan Drainase pada tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian dilanjutkan di Tahun 2018 untuk sinkronisasi program dan kegiatan selama 20 tahun dari tahun 2016 – 2018. Dengan anggaran sebesar Rp. 675.000.000,- dan realisasi Rp.611.274.700,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Masterplan Drainase tahun 2018
- 2) Dokumen Laporan Integrasi tahun 2016 – 2018.
- 3) Data rawan Genangan dan Banjir
- 4) Peta Masterplan Drainase Tahun 2018.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Perencanaan Drainase Permukiman tahun 2016 – 2018
- 2) Tersedianya data Rawan genangan dan banjir tahun 2016 – 2018

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut:

Terdapat Perubahan Fungsi Saluran Irigasi menjadi drainase sehingga menimbulkan potensi genangan.



2. Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan yang memperhatikan perubahan iklim atau pembangunan kota rendah emisi dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim dari berbagai sumber pendanaan ke Kota Bogor. Pada tahun 2018, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi Rp.91.334.256,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan Rendah karbon (PPRK)

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersusunnya Rencana pembangunan Kota Rendah Emisi.

3. Penyelenggaraan Perencanaan Sarana Prasarana Kota

Kegiatan fasilitasi koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota bertujuan untuk memfasilitasi



koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat kelompok kerja (pokja) sanitasi, pokja perumahan dan permukiman, pokja transportasi, pokja RPIJM Kota Bogor serta penyelenggaraan sanitasi award. Dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 244.217.305,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

1) Fasilitasi Pokja Sanitasi

2) Penyelenggaraan sanitasi award

Penyelenggaraan Sanitasi Award Kota Bogor terhadap 50 KSM Sanimas yang dinilai, didapatkan 3 KSM Terbaik yaitu :

- Juara I KSM Amanah Kel. Sindang Sari
- Juara II KSM Maju Bersama Kel. Sukaresmi
- Juara III KSM Mawar 58 Kel. Pamoyanan

Dari 50 KSM tersebut, ada beberapa KSM yang bermasalah, diantaranya adalah tidak adanya biaya operasional, masyarakat tidak mau membayar uang iuran, beberapa MCK belum pernah di sedot, untuk tindak lanjutnya pada tahun 2019 akan dibuat Kajian Evaluasi dan Perencanaan Sanimas Kota Bogor.

3) Fasilitasi Pokja PKP

Dilakukan dengan updating data kawasan kumuh, updating data RTLH Kota Bogor dan mengkoordinasikan penangan kawasan kumuh perkotaan, berdasarkan data dari KOTAKU pada tahun 2018 pengurangan kawasan kumuh di Kota Bogor sebesar 76,4 Ha

4) Fasilitasi Pokja RPIJM yaitu dengan updating data RPIJM, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang cipta karya.

Outcome kegiatannya adalah :

Tersedianya data/informasi hasil Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota yang terdiri dari Sanitasi , Perumahan dan Permukiman, RPIJM, Penilaian Sanitasi Award Kota Bogor terhadap 50 KSM Sanimas.

F. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	75%	95%	95%
	Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	75%	95%	95%
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	75%	95%	67.43%
	Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90%	100%	90%
	Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	NA	88%	80.5%
	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	10%	27%	4.3 %

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
	persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev		100%	100%
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	NA	75 %	74.49%
	Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	NA	1:10.000	1:10.000
	Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	NA	25 %	25%

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan telah dicapai dengan baik melalui pelaksanaan musrenbang, penyusunan rencana pembangunan tahunan, penyusunan kebijakan umum pemerintah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018

Kegiatan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana setiap pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di wilayahnya mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan yang telah direncanakan tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek. Dengan anggaran sebesar Rp. 413.220.000,- dan realisasi sebesar Rp. 406.911.129,-

Output Kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Monitoring Musrenbang Tingkat Kelurahan, dimana Tim Bappeda selain melaksanakan monitoring juga melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Musrenbang oleh Kelurahan. Adapun Hasil dari Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah dokumen hasil musrenbang tingkat Kelurahan.
- 2) Terlaksananya Monitoring Musrenbang Tingkat Kecamatan, dimana Bappeda menyiapkan bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan berupa paparan Walikota dan Kepala Bappeda pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Tim Bappeda juga melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Musrenbang oleh Kecamatan.
- 3) Terlaksananya Forum OPD/ Pra Musrenbang selama 8 hari, dimana membahas rancangan Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 4) Terlaksananya Sidang kelompok Musrenbang Tingkat Kota selama 2 hari yang menghasilkan kesepakatan terkait usulan masyarakat

yang diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- 5) Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota dan Pameran Pembangunan Tingkat Kota Bogor.

Musrenbang Tingkat Kota merupakan acara puncak penyelenggaraan Musrenbang, dimana pada saat pelaksanaan acara ini dipaparkan terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada publik. Selain itu diumumkan juga penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan terbaik sesuai dengan hasil penilaian.

Pameran Pembangunan Tingkat Kota Bogor merupakan salah satu rangkaian dari Musrenbang Tingkat Kota Bogor yang diselenggarakan selama 3 hari bertempat di Plaza Balai Kota Bogor dimana menampilkan hasil-hasil pembangunan dan produk-produk unggulan dari peserta yang tidak hanya perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor melainkan juga dari stakeholder di Kota Bogor seperti BUMN dan instansi lainnya.

- 6) Buku Panduan Musrenbang Tingkat Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Bogor
- 7) Buku Rekapitulasi Usulan Rencana Tahun 2019
- 8) Ikut serta dalam Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersusunnya usulan Rencana 2019 sebagai bahan rancangan awal RKPD Kota Bogor tahun 2019.

Adapun Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Sistem Pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang berubah dari tahun lalu, sehingga Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dalam melakukan asistensi usulan bantuan Provinsi Jawa Barat

- 2) Masyarakat/peserta Musrenbang Kelurahan belum memahami sepenuhnya mekanisme pengusulan kegiatan melalui mekanisme Aplikasi SIMRAL.
- 3) Usulan kegiatan belum menunjukkan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan atau masih bersifat usulan yang rutin.



2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2019 serta Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan tahun 2018

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2018. Penyusunan kebijakan umum tersebut diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.289.027.558,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan).
- 2) Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2019
- 3) Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 (Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)
- 4) Dokumen Prioritas dan plafon Anggaran sementara perubahan 2018

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun RKA PD 2019 dan RKA Perubahan PD 2018

3. Pengkajian RKA SKPD T.A 2019 dan DPPA SKPD TA 2018

Kegiatan pengkajian RKA SKPD TA 2019 dan DPPA SKPD TA 2018 merupakan tindak lanjut dari dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018. Dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.180.171.500,-

Kegiatan pengkajian RKA SKPD TA 2019 dan DPPA SKPD TA 2018 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD. Kegiatan ini ditujukan agar seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan sasaran, tujuan dan target kinerja berdasarkan KUA PPAS TA 2019 dan KUPA PPASP TA 2018.



Tahapan kegiatan pengkajian RKA 2019 dan DPPA SKPD TA 2018 sebagai berikut:

1. Pembahasan dokumen Pra RKA-SKPD 2019 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bahan untuk

- penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Pelaksanaan asistensi Pengkajian Terhadap Usulan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2019;
 3. Mengkaji dan membahas kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta melaksanakan Rekapitulasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebagai bahan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi RKA-SKPD 2019 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor.
 4. Mengkaji dan membahas kesesuaian program dan kegiatan dalam DPPA SKPD TA 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta melaksanakan Rekapitulasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebagai bahan RAPBDP Tahun Anggaran 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi DPPA SKPD TA 2018 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor.

Kegiatan Pengkajian RKA SKPD T.A 2019 dan DPPA SKPD TA 2018 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD. Tujuan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyesuaikan APBD murni 2019 dan APBD-P 2018 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang dibahas bersama antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pengkajian dilakukan apabila selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran.

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Pelaksanaan Asistensi RKA OPD TA. 2019 dan RKA Perubahan TA. 2018 selama 6 hari;
- 2) Rekap kegiatan RKA OPD TA. 2019 dan RKA Perubahan TA. 2018 sebanyak 2 dokumen.

Outcome dari kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Sinergi antara Program dan Kegiatan di RKPD/RKPD Perubahan dengan Program dan Kegiatan yang terakomodir di RKA/RKAP
- 2) Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembangunan sebagai bahan RAPBD

4. Penyusunan RKPD Tahun 2019

RKPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, dan penyusunannya sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD & RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, yang memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Kota Bogor Tahun 2019 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019 dan Rencana APBD Kota Bogor Tahun 2019. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam



RKPD harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Penyusunan RKPD Kota Bogor melalui serangkaian forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan dilaksanakan secara berjenjang/bertahap mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kota Bogor, Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2019 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka untuk selanjutnya dapat ditetapkan prioritas pembangunan daerah.

Adapun proses penyusunan RKPD tahun 2019, diawali dengan penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, rancangan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019, sehingga terbitnya Keputusan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Selain itu, telah disusun RKPD perubahan tahun 2018, dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagai bahan penyusunan KUA perubahan dan PPAS tahun 2018 serta perubahan APBD Tahun 2018. Dengan Anggaran sebesar Rp.194.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.180.686.166,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- 2) Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- 3) Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019

- 4) Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang RKPD Tahun 2019
- 5) Pra Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2018
- 6) Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2018
- 7) Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2018
- 8) Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang RKPD Perubahan Tahun 2018
- 9) Keputusan Walikota Nomor 050.45-163 tahun 2018 tentang Pengesahan Renja OPD Tahun 2019

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tercapainya target RPJMD Tahun 2019, sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2019.

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, dimana ada tahapan fasilitasi oleh Provinsi.
- 2) Percepatan jadwal penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 sesuai dengan kebijakan.

5. Perencanaan Umum

Kegiatan perencanaan umum merupakan kegiatan rutin yang meliputi beberapa penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Kegiatan ini merupakan forum untuk mendiskusikan dan mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, serta sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.800.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.773.593.844,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi serta memenuhi undangan dari pihak Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta maupun provinsi luar pulau jawa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan selama 12 bulan.
- 2) Memfasilitasi penyusunan tugas khusus yang tidak terakomodir dalam kegiatan ini

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas perencanaan dan sinergitas perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan Provinsi Jawa Barat.



6. Penyempurnaan Kajian Teknokratik RPJMD

Kegiatan penyempurnaan kajian teknokratik RPJMD merupakan implementasi dari Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Pasal 42 yang berbunyi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dilanjutkan pada pasal 46 disebutkan bahwa dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kota Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pada tahapan awal, telah disusun rancangan teknokratik RPJMD, yang telah di sampaikan kepada seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi. Tahapan berikutnya adalah tahapan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sampai menunggu pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Posisi saat ini kota Bogor adalah tahap penyempurnaan teknokratik RPJMD.

Untuk mengakomodir kegiatan tersebut, maka pada anggaran perubahan di anggarakan sebesar Rp. 75.000.000, Dari dana tersebut terserap sebesar Rp. 49.254.228 (65,67%). Disamping karena efisiensi di kegiatan makan minum rapat, juga memaksimalkan nara sumber yang berasal dari intern Bappeda sehingga tidak memerlukan anggaran honor narasumber. Sedangkan keluaran dari kegiatan ini berupa kegiatan FGD dan dokumen penyempurnaan teknokratik mencapai 100%.

Seluruh perangkat daerah merupakan sasaran dari kegiatan penyusunan teknokratik RPJMD. dan berdasarkan Permendagri No. 86 , seluruh perangkat daerah secara bersamaan menyusun juga rancangan teknokratik renstra perangkat daerah.

Penyempurnaan Rancangan teknokratik RPJMD, memuat ;

- a) Pendahuluan
- b) Gambaran umum dan Kondisi daerah
- c) Gambaran Keuangan Daerah
- d) Permasalahan dan issue Strategis daerah
- e) Visi, misi, tujuan sasaran
- f) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
- g) Kerangka Pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah

h) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Output kegiatan ini sebagai berikut

:

Dokumen Kajian Teknokratik RPJMD 2020-2024

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Kajian Teknokratik RPJMD 2019-2024

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

Masih ada OPD yang tidak Responsif terhadap kajian Teknokratik.



7. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan adalah Rp. 150.000.000 dan realisasi Rp. 133.444.178 (88.96%). Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
- Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan
- Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi adalah Permendagri no.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Sasaran dari kegiatan pengendalian dan evaluasi ini adalah seluruh perangkat daerah se Kota Bogor. Sedangkan indikator capaian kinerjanya adalah presentasi indikator kinerja sasaran Pembangunan Daerah Dalam RPJMD yang mencapai target yaitu 66,67% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 95 % .

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan telah dilaksanakan setiap triwulan untuk menghitung capaian kinerja RKPD Tahun Anggaran 2018 dan pada akhir tahun 2018 untuk mengevaluasi capaian kinerja sasaran RPJMD pada Tahun Anggaran 2018. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran RPJMD yang belum mencapai target pada TA 2018 adalah sebagai berikut :

- Masih banyak program/kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada output, belum berorientasi pada outcome
- Masih banyak program/kegiatan perangkat daerah yang kurang matang dalam menyusun perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya masih ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
- Dalam penyusunan rencana kinerja belum memaksimalkan target target kinerja sasaran renstra perangkat daerah tahun 2018 dan target RPJMD tahun 2018
- Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dimana capaiannya belum dijadikan dasar pemberian reward atau punishment

Rekomendasi perbaikan capaian penetapan dalam rangka kinerja

- Tolak ukur kinerja perencanaan perangkat daerah harus lebih berorientasi pada hasil bukan hanya optimal berorientasi pada output
- Dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran suatu kegiatan harus mengacu pada pencapaian target

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Buku Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah
- 2) Terselenggaranya Workshop Pengendalian & Evaluasi Perangkat Daerah

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Terevaluasinya Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
- 2) Terevaluasinya Capaian Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RP JMD

8. Penyusunan kajian Hirarki Perencanaan

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP) Perencanaan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya SOP ini menjadi acuan dan kegiatan perencanaan Infrastruktur dapat sistematis sesuai dengan ketentuan teknis dan Peraturan perundangan.



Adapun aspek yang ditetapkan hirarki perencanaannya yaitu bangunan gedung, transportasi, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan. Hasil akhir kegiatan ini adalah pedoman SOP Perencanaan Infrastruktur.

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.99.650.000,- dan realisasi sebesar Rp.97.380.000,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Standar Operasional Prosedur Perencanaan Infrastruktur

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terlaksananya Tahapan Perencanaan yang sistematis.

9. Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Prosentase Keselarasan antara Renja

Perangkat Daerah dengan RKPD yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan mitra lingkup Subid pemerintahan tahun 2019 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018.

Evaluasi dilakukan dengan Rekapitulasi Laporan program dan kegiatan dengan format matriks sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017. Adapun Perangkat daerah mitra subid Pemerintahan adalah :

1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Bagian Administrasi Pemerintahan
3. Bagian Kerjasama
4. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
5. Bagian Umum
6. Bagian Organisasi



7. Bagian Humas dan protokol
8. Sekretariat DPRD
9. Inspektorat
10. Bapenda
11. Kecamatan Bogor Selatan
12. Kecamatan Bogor Barat
13. Kecamatan Bogor Timur
14. Kecamatan Tanah Sareal
15. Kecamatan Bogor Utara
16. Kecamatan Bogor Tengah

Selain kegiatan pelaksanaan monitoring pencapaian target program kegiatan tahun 2018 dan rencana target program tahun 2019 berdasarkan RPJMD 2015-2019, juga dilaksanakan pembuatan draft aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Rencana kegiatan Anggaran (SIRIKA) atau bisa dibuka melalui *sirika.kotabogor.go.id* yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja Anggaran secara online, diharapkan kedepannya sistem ini bisa terus dikembangkan, sehingga pelaksanaan asistensi RKA /DPA bisa efektif dan efisien. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.169.380.000,- dan realisasi sebesar Rp.168.967.992.,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

1. Laporan Capaian Kegiatan
2. Laporan Hasil Monev Bidang Pemerintahan
3. Sosialisasi Hasil Monev

Outcome kegiatan ini sebagai berikut:

1. Termonitornya pelaksanaan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan
2. Program atau kegiatan dalam perencanaan lingkup pemerintahan yang selaras dengan RPJMD/ RKPD

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Beberapa usulan Tahun 2019 di Kelurahan kegiatan sarana prasarana untuk posyandu masih ada yang lahannya belum siap.
- 2) Masih ada yang Beberapa kegiatan di Mitra OPD subid Pemerintahan tertunda karena gagal lelang dan lain-lainlahannya belum siap.



10. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Banprov)

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 69.118.710.,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Meningkatnya Sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi Jawa Barat

Outcome kegiatan ini sebagai berikut:

Rakor Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Dokumen Kebijakan Pembangunan Kota Bogor 2019).

kegiatan Rakor Sinergitas Perencanaan Pembangunan ini diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2019 yang di ikuti oleh 50 orang peserta , bertempat di Hotel Royal Bogor .

Adapun peserta rakor terdiri dari :

- Perwakilan BPS
- Bappeda
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

- Dinas Kependudukan Catatan Sipil
- Dinas Perdagangan dan Industri
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu
- Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- Terkendalanya dana SP2D dari provinsi baru masuk pertengahan Bulan Agustus 2018, sehingga pelaksanaan tertunda tidak sesuai dengan anggaran kas perbulan
- Peroleh data yang sulit dan tidak tepat waktu.

G. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

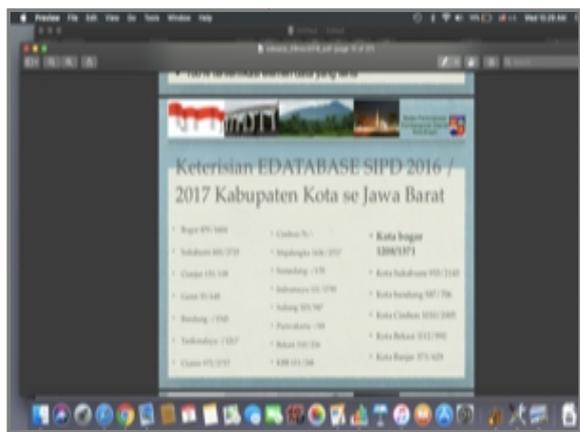
Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Pengembangan Data dan Informasi	Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	80%	95%	95%
	Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem	80%	95%	95%

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
	Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)			
	Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	8.766	9.016	9.016

Dengan kegiatannya sebagai berikut :

1. Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)

Merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan, data pembangunan dibagi menjadi 2 yakni Data Spasial dan Data Aspasial. Data Spasial terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Sedangkan Data Aspasial terbagi menjadi Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus. Cara memperoleh Statistik Sektoral dan Statistik khusus, adalah dari data primer yang diolah dari monitoring dan evaluasi ataupun dari data sekunder hasil pendataan Badan



Pusat Statistik.

Dasar Hukum SIMPATIK adalah mengacu pada lampiran I Permendagri No 98 / Tahun 2018. Dalam Permendagri tersebut terdapat urusan wajib pemerintahan dasar dan urusan wajib pemerintahan non dasar serta urusan pilihan, pengelolaan SIMPATIK telah disesuaikan dengan konsepsi urusan pemerintahan dan perangkat daerah. Dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.334.063,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya data aplikasi SIMPATIK 2018
- 2) Pemetaan Data Pokok Pembangunan Daerah (9.016 elemen)
- 3) Integrasi Data Perangkat Daerah pada SIMPATIK (1 Dokumen)
- 4) Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional/Propinsi (2 Kali)
- 5) Keterisian Data SIMPATIK mendukung Data SIPD Kemendagri (Terbaik ke- 2 se-Propinsi Jawa Barat)

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Meningkatnya Ketersediaan dan Validitas Data dan Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan.

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat Perangkat Daerah yang sulit menginput data
- 2) SDM Data Perangkat daerah khusus data
- 3) Belum ada mekanisme rewards punishment tentang Data

2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)

Pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana tahun ini ditujukan untuk menyempurnakan dan penambahan modul yaitu menu perubahan pada aplikasi serta pendalaman dalam pengoperasian simral yang sudah terintegrasi

antara perencanaan , penganggaran, pelaporan dan penatausahaan sebagai implementasi sistem pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 89.865.605 atau 89,87% Kegiatan ini merupakan suatu proses tahapan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD , RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

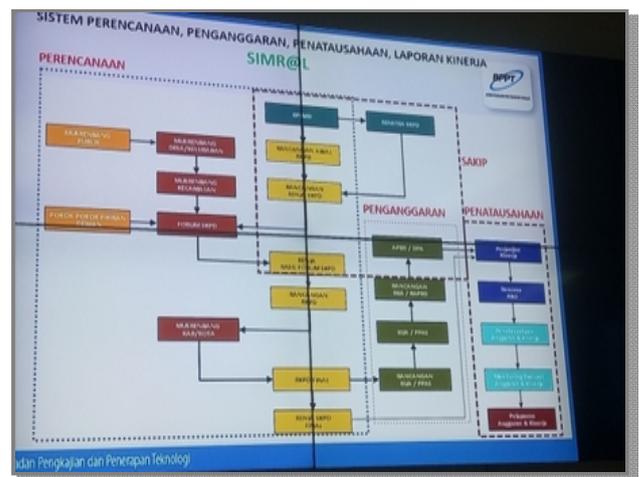
Pelaksanaan kegiatan ini berupa bimbingan langsung dan workshop dalam pengelolaan SIMRAL kepada pengelola, operator perangkat daerah serta operator DPRD. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh perangkat daerah mampu

mengimplementasikan seluruh tahapan perencanaan tahun 2018 dengan menggunakan SIMRAL.

Kegiatan dilaksanakan guna mendukung misi 1 yaitu menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan

komunikasi yang termaktub dalam RPJMD Kota Bogor. Target indikator program kegiatan ini adalah persentase penerapan e planning adalah 100% . Capaian pada tahun 2018 sudah mencapai 100% karena seluruh perangkat daerah se Kota Bogor sudah menerapkan SIMRAL pada seluruh tahapan perencanaan.

Output pelaksanaan ini adalah :



- 1) Terselenggaranya workshop pengelolaan SIMRAL bagi pengelola dan operator perangkat daerah dan operator DPRD
- 2) Pemutahiran sistem perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 paket aplikasi dengan melakukan penambahan modul dalam system.



Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Tercapainya Target Penerapan E-planning, E-budgeting, dan E-monev

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Fisik dan Sarpras Kota secara swakelola guna mensinkronisasi dan koordinasi terhadap setiap kegiatan SKPD Lingkup Bidang Fisik (Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumkim, dan Dinas Lingkungan Hidup).

Tujuan kegiatan ini memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan di tahun pelaksanaan, baik pekerjaan fisik dan perencanaan yang terpadu. Dengan anggaran sebesar Rp.245.900.000,- dan realisasi Rp.190.949.605,-

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen triwulan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkup Bidang Fisik

- 2) Program software Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota
- 3) Dokumen Konsep Desain landscape kawasan Jembatan Merah.

Outome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersedianya data triwulan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkup Bidang Fisik tahun 2018
- 2) Tersedianya program software Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota
- 3) Tersedianya dokumen Konsep Desain landscape kawasan Jembatan Merah.

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Kesulitan dalam penyediaan data matriks dari dinas teknis terkait
- 2) Program sistem informasi sarana dan prasarana kota masih perlu di update untuk fitur pengisian data matriks
- 3) Pada perlombaan konsep desain landscape kawasan jembatan merah belum lengkapnya konsep secara terintergrasi pada kawasan jembatan merah.

H. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	80%	95%	95%

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan :



1. Perencanaan Subid Pemberdayaan

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-dan realisasi sebesar Rp.272.717.016,-

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan lingkup sub bidang perencanaan pemberdayaan, sesuai dengan indikator kinerja Program Perencanaan Sosial Budaya yaitu Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RPJMD.

Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA. 2018, membuat Kajian Wilayah Ramah Keluarga Dimensi Karakter Keluarga dan Masyarakat, memfasilitasi Pelaksanaan TOT Sekolah Ibu dan membuat Kaji Aksi Peran Lansia dalam Kampung Ramah Keluarga.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah disesuaikan dengan format yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Adapun Perangkat Daerah Mitra Subid Pemberdayaan yaitu:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian



8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA. 2018
- 2) Kajian Wilayah Ramah Keluarga Dimensi Karakter Keluarga dan Masyarakat
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan TOT Sekolah Ibu
- 4) Kaji Aksi Peran Lansia dalam Kampung Ramah Keluarga

Outcome kegiatan ini sebagai berikut:

Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RPJMD

2. Pro Poor Planning And Budgeting (P3B) + PPRG (Banprov 2018)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Melalui Bantuan Keuangan ini, TKPKD Kabupaten /Kota didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023. Penyusunan RAD ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan RAD

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.95.582.400,-

Adapun tahapan penyusunannya sebagai berikut:

- a. Workshop Evaluasi Program



Kemiskinan Daerah Tahun 2013 – 2018

- b. Focuss Group Discussion (FGD) Kerangka Model dan Action Plan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor 2019-2023.
- c. Focuss Group Discussion (FGD) Sektor Fisik
- d. Focuss Group Discussion (FGD) Sektor Ekonomi

Output kegiatan ini sebagai berikut:

- 1) FGD Pengembangan Program Kemiskinan
- 2) Monitoring Pelaksanaan Program Kemiskinan
- 3) Workshop Evaluasi Program Kemiskinan Daerah
- 4) RAD Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kota Bogor Tahun 2019-2023.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RPJMD

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

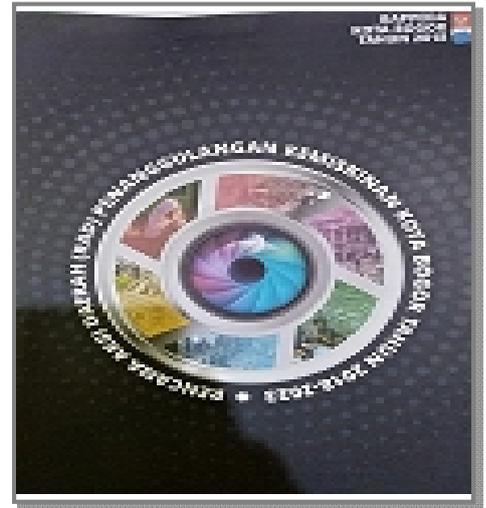
Sesuai arahan dari Provinsi ada satu FGD yang tidak dilaksanakan karena FGD tersebut adalah untuk sinkronisasi RAD Kemiskinan Provinsi dengan RAD Kemiskinan Kabupaten dan Kota. Sampai saat ini RAD Kemiskinan Provinsi belum selesai disusun.

3. Perencanaan Subid Sosial Budaya

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 202.245.000,- dan realisasi sebesar Rp. 190.407.982,- dilaksanakan meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPA Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan setiap triwulan, pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 2 (dua) kali pada semester I dan II, penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Bogor Tahun 2020-2024 dengan menggunakan tenaga ahli dan diskusi dengan para pemangku kepentingan di Kota Bogor, serta pelaksanaan Sosialisasi

Peraturan Walikota Bogor Nomor 84 Tahun 2018 tentang Rencana Aksis Daerah Pangan dan Gizi Kota Bogor Tahun 2020-2024.

Perangkat daerah lingkup Sosial Budaya terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Bagian Administrasi



Kesejahteraan Masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan pembangunan sub bidang sosial yang mendukung penurunan angka kemiskinan melalui penajaman sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan pedoman rencana aksi daerah di urusan ketahanan pangan dan urusan kesehatan periode 2020-2024 untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan OPD Lingkup Bidang sosial Budaya
- 2) Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi kegiatan OPD Lingkup Bidang Sosial budaya.
- 3) Rapat Koordinasi TKPK Kota Bogor
- 4) Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
- 5) Sosialisasi RAD Pangan dan Gizi

Outcome kegiatan ini sebagai berikut:

Tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan Sosial budaya yang selaras dengan RPJMD/RKPD

Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi masih membandingkan antara DPA dengan Realisasi Kinerja OPD belum menilai perencanaannya.
- 2) Pemahaman tentang Basis Data Terpadu sebagai acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan antar OPD belum sama..
- 3) Belum adanya acuan di tingkat Provinsi Jawa Barat sehingga RAD yang disusun berdasarkan data kondisi Kota Bogor dan dokumen Perencanaan di Tingkat Pusat (Rencana Aksi Nasional) maupun Internasional (SDGs)

I. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Kerjasama Pembangunan	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	NA	3.500.000.000	2.193.744.450
	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	NA	8 %	24 %

1. Kegiatan Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor.

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasinya Rp. 117.964.239 (78.64%)

output kegiatan ini sebagai berikut :



- 1) Sosialisasi penyelenggaraan TJSLP/CSR Kota Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 24 September 2018.
Agenda acara sosialisasi meliputi:
 - a. Sosialisasi aturan hukum terkait pengelolaan TJSLP/CSR Kota Bogor
 - b. Arahan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat: pengelolaan TJSLP/CSR di Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memadu selaraskan Program TJSLP/CSR dari kalangan swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Jawa Barat.
 - c. Arahan Walikota Bogor terkait program/kegiatan TJSLP/CSR di Kota Bogor:
 - 1) Penataan Kawasan Suryakencana
 - 2) Penataan Kawasan Taman Topi
 - 3) Sekolah Ibu
- 2) Rapat Koordinasi Penyiapan Kegiatan TJSLP/CSR
 - a. Rapat pembahasan penyusunan Forum TJSLP/CSR yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2018
 - b. Rapat pembahasan persiapan penyusunan MOU TJSLP/CSR yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2018
 - c. Rapat pembahasan persiapan pelaksanaan TJSLP/CSR yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2018
- 3) Pembuatan Peta Potensi TJSLP/CSR
 - a. Peta potensi TJSLP/CSR dibagi menjadi peta tematik: perdagangan dan jasa, industri, bank, dan perkantoran lainnya



- b. Hasil pemetaan: perdagangan dan jasa terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Tengah (mall atau pusat perbelanjaan dan hotel), industri tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bogor Tengah, bank dan perkantoran umumnya terkonsentrasi di sepanjang Jalan Pajajaran.
- c. Laporan kegiatan yang sudah terlaksana dari pendanaan TJSLP/CSR 2018, sebagian besar berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah.

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terciptanya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor.



Permasalahan kegiatan ini sebagai berikut :

Pelaksanaan TJSLP/CSR belum optimal karena masih kecilnya peran TJSLP/CSR dalam pembangunan Kota Bogor dan masih minimnya data pelaksanaan TJSLP/CSR yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Tim Fasilitasi TJSLP/ CSR Kota Bogor.

2. **Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov 2018)**
Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasinya Rp. 71.612.000,

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Database penawaran Program dan Kegiatan yang akan diusulkannya pendanaannya melalui TJSLP/CSR:
 - Usulan dari 17 Perangkat Daerah berjumlah Rp 72.866.460.550,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 2014 judul kegiatan

- Daftar pendek usulan strategis dari 17 Perangkat Daerah berjumlah Rp 24.460.170.550,-
- Realisasi pendanaan TJSPL/CSR Kota Bogor 2018 berdasarkan laporan yang diserahkan kepada Tim Fasilitasi/Bappeda Kota Bogor berjumlah Rp 2.193.744.450,-. Sedangkan target capaian nya mencapai Rp. 3.500.000.000.-
- Tidak semua kegiatan yang didanai oleh TJSPL/CSR merupakan kegiatan yang ada di dalam database, karena ada kegiatan-kegiatan TJSPL/CSR yang sudah rutin dilaksanakan oleh perusahaan termasuk di dalam pelaporan TJSPL/CSR perusahaan.
- Capaian Pendanaan kegiatan melalui dana TJSPL/CSR berada di bawah target karena tidak semua perusahaan di Kota Bogor memberikan laporan pelaksanaan TJSPL/CSR kepada Tim Fasilitasi TJSPL Kota Bogor. Kegiatan yang didanai oleh TJSPL/CSR mencapai 24 %, Program yang ada di RPJMD (35 Program dari 144 program di RPJMD) Melebihi target yang berjumlah 8 % .

Adapun Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan TJSPL/CSR dan telah melaporkan kegiatannya.

1. Bank Pembangunan Daerah BJB cabang Bogor
2. Perumda BPR Bank Kota Bogor
3. PDAM Tirta Pakuan
4. PT. Adev Natural Indonesia
5. PT. Taspen (Persero)
6. PT. Anggana Cendekia (Botani Square)
7. PT. Agricon
8. 101 Hotel Bogor Suryakencana
9. Hotel Mirah
10. PT. Sarana Multi Infrastruktur

11. Yayasan Inspirasi Anak Bangsa

Pada tanggal 20 Desember 2018 telah dilaksanakan pemberian sertifikat penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan TJSL/CSR dan penandatanganan kesepakatan bersama mendukung pelaksanaan Program TJSLP/CSR Kota Bogor oleh Bapak Sekda Kota Bogor, Ketua Forum TJSLP, dan perwakilan perusahaan-perusahaan yang hadir pada acara tersebut.

- 2) Website CSR. Website CSR dibangun dengan tujuan sebagai sarana komunikasi Tim Fasilitasi TJSLP/CSR dengan Forum TJSLP/CSR, dan sebagai sarana penyebarluasan informasi TJSLP/CSR kepada masyarakat

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terciptanya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor

J. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	80%	95%	90%

1. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Litbang

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasinya Rp. 135.639.125. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari perencanaan di lingkup bidang ekonomi, dan untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan di tiap OPD di lingkup bidang ekonomi pada tahun anggaran 2018 serta untuk mengidentifikasi potensi- potensi ekonomi yang ada di masyarakat khususnya usaha-usaha yang sudah berkelompok, yang memberikan dampak signifikan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikembangkan. Hasil identifikasi ini sampai kepada road map tahunan yang merupakan arahan untuk tiap OPD dalam membantu mengembangkan kawasan tersebut dan sebagai embrio dari OVOP (One Village One Product) dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk klasterisasi usaha industri perkotaan Kota Bogor. Untuk mengetahui pencapaian di tiap OPD di lingkup bidang ekonomi dilaksanakan monitoring ke beberapa OPD diantaranya :

- DPMPTSP
- Disbudpar dan ekonomi kreatif
- Disperindag
- Disnaker
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Pertanian
- Dinas Ketahanan Pangan
- Bagian Administrasi Perekonomian

Untuk memperoleh laporan pencapaian kegiatan tahunannya. Hasil dari laporan monitoring ini digunakan sebagai bahan acuan dan rekomendasi dalam mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, telah teridentifikasi beberapa potensi yang bisa diangkat untuk dikembangkan diantaranya

kerajinan batik di Kelurahan Ciluar, Kerajinan Logam di Kelurahan Cibadak, kerajinan Alas kaki di Kelurahan Pamoyanan, Cikaret dan Mulyaharja. Fashion di Kelurahan Bubulak dan Olahan pangan di Kelurahan kayu Manis (ayam ungkep) dan tanah baru (Singkong dan turunannya).

Output kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Dokumen Hasil Monev Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang
- 2) Perencanaan pengembangan Ekonomi Lokal

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Tersedianya data hasil koordinasi dan monitoring sebagai bahan kebijakan dan perencanaan ke depan
- 2) Perecepatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Bogor



2. Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan berbagai informasi tentang ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan, antara lain :

1. Menggambarkan kondisi ketenagakerjaan saat ini (kondisi eksisting)
2. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Tenaga kerja (RTK) Kota Bogor tahun 2019 – 2023
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program terkait masalah ketenagakerjaan Kota Bogor.

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasinya Rp. 49.235.000,

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Dokumen Perencanaan ketenagakerjaan

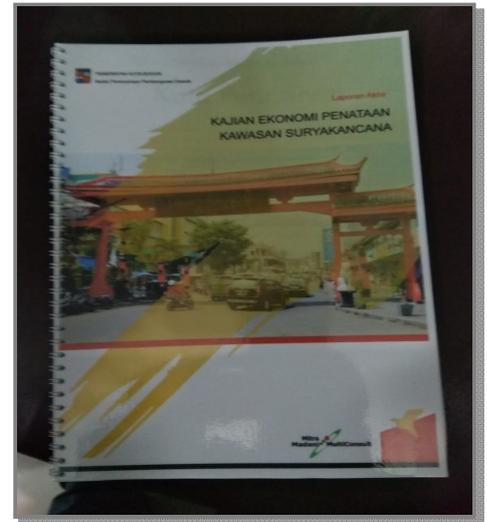
Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terlaksananya Perencanaan

Ketenagakerjaan

Permasalahan kegiatan ini adalah :

Data dasar Ketenagakerjaan Kota Bogor kurang lengkap



3. Kajian Ekonomi Penataan Surya Kencana

Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasinya Rp. 49.207.500, adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya penataan usaha ekonomi di kawasan Suryakencana sebagai kawasan heritage, adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi kondisi eksisting perekonomian yang ada di kawasan suryakencana (jumlah pedagang, PKL)
- 2) Menyediakan solusi terhadap permasalahan yang ada di kawasan suryakencana terkait tempat relokasi baru pedagang dan UMKM informal.
- 3) Menyediakan langkah-langkah yang terarah dalam masalah sosial ekonomi kawasan suryakencana, sehingga pelaksanaan penataan kawasan suryakencana dapat berjalan lancar tanpa adanya gesekan dan hambatan di lapangan .

Output kegiatan ini sebagai berikut :

Dokumen Kajian Ekonomi Penataan Surya Kencana

Outcome kegiatan ini sebagai berikut :

Terlaksananya Pendukung Penataan Surya Kencana

K. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target 2018	Capaian 2018
Perencanaan Tata Ruang	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD	NA	90 %	80%

1. Penyusunan PERDA Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor yang bertujuan untuk merumuskan rancangan PERDA Perubahan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 sebagai bahan persetujuan substansi ke TKPRD provinsi dan Kementrian ATR. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi Rp. 217.305.704,-.

Adapun komponen kegiatan ini adalah :

1) Penyusunan naskah akademis Perubahan RTRW

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun naskah akademis sebagai bahan pendukung penyusunan Raperda revisi RTRW. Naskah Akademis ini berisi dasar berpijak, ketentuan-ketentuan peraturan perundangan serta cakupan pengaturan dalam RTRW. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Naskah Akademis Perubahan RTRW.

2) Fasilitasi penyusunan Raperda Perubahan RTRW



Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan finalisasi Raperda serta memfasilitasi pembahasan dengan Pansus DPRD Kota Bogor Revisi RTRW. Pansus dibentuk awal Mei 2018, dan menghasilkan finalisasi kesepakatan tentang Revisi RTRW pada Bulan Desember 2018.

Output kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Naskah Akademis dan Pendampingan

Outcome kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tersusunnya Peraturan Daerah Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD			95	100			95				
2	Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD			95	100			95				
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD			95	100			95				
4	Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD			100	100			100				
5	Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP			88	90			80,5				
6	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP		Ada / tidak	27	30			4,3				
7	Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev		Ada / tidak	100	100			100				
8	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP		Ada / tidak	3,5 milyar	4 milyar			2.19				

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi OPD	Target IKK	Target IKU	Target Renstra OPD Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)		(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	Jumlah program RKPD tahun/jmlh program RPJMD yg harus dilaksanakan x 100%		8	10	10		10				
10	Penyusunan perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	Ada / tidak		95	97	95						
11	Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)		Jumlah program RKPD / Jumlah program dalam RPJMD x 100%	95	97	95						
12	jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data		Jumlah Program Renstra SKPD/jmlh program	8766	9016	9016						



			dalam RPJMD x 100%									
13	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD		Jumlah Program Renja OPD /Jml program dalam RKPD x 100%	95	97	95						
14	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD		Jumlah Usulan Masyarakat /Jumlah Belanja Langsung x 100 %	95	97	95						
15	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD		Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang pada OPD/Jumlah kegiatan dalam program pemanfaatan ruang RTRW. X 100%	90	90	80						

16	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD		Jumlah Produk yang dapat diakses oleh masyarakat/Jumlah Produk Perencanaanx100%	95	97	90					
17	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target			95	97	66,67					
18	Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target			95	97	82,46					
19	Persentase ketercapaian indikator program penataan ruang			90	95	80					
20	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD			75	80	75					
21	Ratio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang			1:1000 0	1:1000 0	1:1000 0	2,5:100 00				
22	Persentase keterwakilan dender dalam kegiatan musrenbang			25	30	25	28				
23	Jumlah inovasi masyarakat yang telah diinventarisir			40	60	44					
24	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota			30	30	100					
25	Jumlah penghargaan yang			3	3						



	diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat					12						
26	Nilai LKIP Perangkat Daerah			83	84	72,89						
27	Jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan			100	100	100						

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, Holistik, terintegrasi dan mengarah pada Konektifitas secara spasial serta berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan Reformasi Birokrasi.
- b. Perencanaan Pembangunan Berbasis Kinerja.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah menuju pada terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- d. Menumbuh kembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat
- e. Peningkatan peran Litbang dalam mendukung perumusan kebijakan Pembangunan Daerah,

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kota Bogor	Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.	1 dokumen	738.900.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kota Bogor	Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.	1 dokumen	738.900.000	
			Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6 kecamatan				Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6 kecamatan		
			Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	4 Bidang				Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	4 Bidang		
			Rekapitulasi Hasil Musrenbang	10 Hari				Rekapitulasi Hasil Musrenbang	10 Hari		
			Pameran Pembangunan	1 paket				Pameran Pembangunan			
			Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang	4 penghargaan				Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang	1 paket		
			Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 hari				Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 hari		
			Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan	2 kali				Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan	2 kali		



NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Musrenbang Nasional					Musrenbang Nasional			
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Rancangan RKP Tahun 2021	8 set	119.859.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Rancangan RKP Tahun 2021	8 set	119.859.000	
			Peraturan Walikota tentang RKP Tahun 2021	55 buku				Peraturan Walikota tentang RKP Tahun 2021	55 buku		
			Rancangan RKP Perubahan Tahun 2020	8 set				Rancangan RKP Perubahan Tahun 2020	8 set		
			Peraturan Walikota tentang RKP Perubahan Tahun 2020	55 buku				Peraturan Walikota tentang RKP Perubahan Tahun 2020	55 buku		
			Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA.2021	1 paket				Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA.2021	1 paket		
			Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll Perubahan TA.2020	1 paket				Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll Perubahan TA.2020	1 paket		
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya										
3	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kota Bogor	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1 Dokumen	401.928.250	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kota Bogor	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1 Dokumen	401.928.250	
			Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2 Dokumen				Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2 Dokumen		
			Rekomendasi	1 Dokumen				Rekomendasi	1 Dokumen		



NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan					Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan			
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam										
4	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Kota Bogor	Dokumen Rencana Induk Utilitas	1 Dokumen	620.000.000	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Kota Bogor	Dokumen Rencana Induk Utilitas	1 Dokumen	620.000.000	
5	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen	116.373.800	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen	116.373.800	
6	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	Kota Bogor	Dokumen strategi sanitasi kota	1 Dokumen	289.415.000	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	Kota Bogor	Dokumen strategi sanitasi kota	1 Dokumen	289.415.000	
			Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1 Dokumen				Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1 Dokumen				Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1 Dokumen		
	Program Penelitian Pengembangan										
7	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor	Kota Bogor	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1 lomba	652.300.000	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor	Kota Bogor	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1 lomba	652.300.000	
			Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1 acara				Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020	1 acara		
			Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	1 jejaring				Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	1 jejaring		



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik	1 dokumen				Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik	1 dokumen		
			Sosialisasi HAKI Inovasi Peserta Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor	3 sosialisasi				Sosialisasi HAKI Inovasi Peserta Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor	3 sosialisasi		
			Pembuatan Video Inovasi	1 video				Pembuatan Video Inovasi	1 video		
8	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arah strategis Rencana Aksi Pendapatan Daerah	1 dokumen	536.877.400	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arah strategis Rencana Aksi Pendapatan Daerah	1 dokumen	536.877.400	
9	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Kota Bogor	Tersedianya data informasi, dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yg sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat	1 dokumen	289.415.000	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Kota Bogor	Tersedianya data informasi, dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yg sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat	1 dokumen	289.415.000	
10	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	1 dokumen	263.327.400	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	1 dokumen	263.327.400	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	Kota Bogor	Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor	1 dokumen	174.421.000	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	Kota Bogor	Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor	1 dokumen	174.421.000	
			Dokumen Perencanaan Kota Sehat	1 dokumen				Dokumen Perencanaan Kota Sehat	1 dokumen		
			Pembinaan Forum Kota Sehat	12 bulan				Pembinaan Forum Kota Sehat	12 bulan		
	Program Perencanaan Tata Ruang										
12	Perencanaan Tata Ruang	Kota Bogor	Dokumen Laporan Pendampingan	1 dokumen	295.336.000	Perencanaan Tata Ruang	Kota Bogor	Dokumen Laporan Pendampingan	1 dokumen	295.336.000	
			Materi Sosialisasi Tata Ruang	1 dokumen				Materi Sosialisasi Tata Ruang	1 dokumen		
			Dokumen Kinerja Tata Ruang	1 dokumen				Dokumen Kinerja Tata Ruang	1 dokumen		
13	Pengembangan Informasi Geospasial	Kota Bogor	Peta Dasar Mutakhir	1 dokumen	499.350.000		Kota Bogor			499.350.000	
			Simtaru dan Simpul Jaringan	1 sistem							
	Program Pengembangan Data dan Informasi										
14	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 buku	82.690.000	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 buku	82.690.000	
			Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1 naskah				Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	1 naskah		
			Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216 elemen data				Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	9216 elemen data		



NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 dokumen				Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 dokumen		
	Program Kerjasama Pembangunan										
15	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	Kota Bogor	Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1 dokumen	34.127.000	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	Kota Bogor	Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1 dokumen	34.127.000	
			Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3 kali				Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3 kali		
			Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	1 dokumen							
	Program Pengendalian Pembangunan										
16	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Workshop SIPD	1 kali	96.200.000	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Terselenggaranya Workshop SIPD	1 kali	96.200.000	
			Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1 dokumen				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1 dokumen		
			Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	2 kali				Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD	2 kali		
			Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	300 buah				Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	300 buah		
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
17	Penyusunan Perencanaan dan	Bappeda Kota	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	45.479.400	Penyusunan Perencanaan dan	Bappeda Kota	Tersusunnya Renja	1 dokumen	45.479.400	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaporan PD	Bogor	Tahun 2021			Pelaporan PD	Bogor	Perangkat Daerah Tahun 2021			
			Tersusunnya LKIP	1 dokumen				Tersusunnya LKIP	1 dokumen		
			Tersusunnya LKPJ	1 dokumen				Tersusunnya LKPJ	1 dokumen		
			Tersusunnya LPPD	1 dokumen				Tersusunnya LPPD	1 dokumen		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
18	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Bappeda Kota Bogor	Honorarium Pegawai PNS	12 bulan	2.969.439.850	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Bappeda Kota Bogor	Honorarium Pegawai PNS	12 bulan	2.969.439.850	
			Honorarium Pegawai Non Pns (Supir)	12 bulan				Honorarium Pegawai Non Pns (Supir)	12 bulan		
			Belanja Alat Tulis Kerja	1 paket				Belanja Alat Tulis Kerja	1 paket		
			Pembayaran Listrik	12 bulan				Pembayaran Listrik	12 bulan		
			Belanja Surat Kabar	12 bulan				Belanja Surat Kabar	12 bulan		
			Pembayaran Air/ PDAM	12 bulan				Pembayaran Air/ PDAM	12 bulan		
			Pembayaran Telepon	12 bulan				Pembayaran Telepon	12 bulan		
			Belanja Makan Dan Minum Rapat	1 paket				Belanja Makan Dan Minum Rapat	1 paket		
			Pembayaran STNK Roda 2	24 unit				Pembayaran STNK Roda 2	24 unit		
			Pembayaran STNK Roda 4	10 unit				Pembayaran STNK Roda 4	10 unit		
			Pengadaan Jasa Keamanan	1 paket				Pengadaan Jasa Keamanan	1 paket		
			Pengadaan Jasa Kebersihan	1 paket				Pengadaan Jasa Kebersihan	1 paket		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
19	Pengadaan	Bappeda	Belanja Pengadaan	4 unit	1.001.100.000	Pengadaan	Bappeda	Belanja	4 unit	1.001.100.000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inventaris Kantor	a Kota Bogor	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			Inventaris Kantor	Kota Bogor	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
			BM.Pengadaan AC 1/2 PK	1 unit				BM.Pengadaan AC 1/2 PK	1 unit		
			BM.Pengadaan Komputer PC	3 unit				BM.Pengadaan Komputer PC	3 unit		
			BM.Pengadaan Printer	2 unit				BM.Pengadaan Printer	2 unit		
			BM.Pengadaan Server	1 unit				BM.Pengadaan Server	1 unit		
20	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bappeda Kota Bogor	Renovasi Bappeda	1 paket	661.520.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Bappeda Kota Bogor	Renovasi Bappeda	1 paket	661.520.000	
			Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket				Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket		
			Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket				Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Kota Bogor sebagai unsur perencana pembangunan daerah tidak terkait langsung dalam penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat tetapi sebagai penyelenggara dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kota Bogor yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2020 yang tertuang di dalam RPJMD 2019 - 2024. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Barat menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor. Dalam dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselarakan dengan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024. Tujuan dan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Jawa Barat

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran* (3)	Indikator Sasaran* (4)	Satuan (5)	Target Kinerja (6)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	1 Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	1 Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	persen	75	80	85	90	95	100
		1 Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	2 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat
3. Meningkatkan kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
4. Meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
6. Meningkatkan ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Jawa Barat yaitu :

1. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, maka dapat diidentifikasi factor-faktor penghambat pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam mendukung target target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Jabar Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Efektivitas Pola koordinasi antara Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.

Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang propinsi, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi
4. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya factor factor pendorong yang dapat mendukung pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Bappeda propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah sinergis dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyelarasan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: **“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”** Kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Bappeda mendukung dalam mewujudkan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas” dan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”

Demi terwujudnya Visi Misi Kota Bogor dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki **TUJUAN** : **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi”** yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, dengan **Indikator Kinerja Tujuan** sebagai berikut :



1. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota.
2. Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target.
3. Indeks Inovasi Daerah.

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 5 (lima) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
 - a. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota (26)
2. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - a. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target (100)
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - a. Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk (10)
 - b. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD (20)
4. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - a. Indeks Inovasi Daerah (650)

5. Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
- a. Nilai AKIP Bappeda (A)
 - b. Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK,Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti (100)

Tabel 3.2**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokras	-	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
		-	Persentase indikator	80	85	90	95	100

			kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target					
			Indeks inovasi Daerah	601-610	611-620	621-630	631-640	641-650
		Meningkatnya sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
		Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	85	90	95	100
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	5	6	7	8	9
			Persentase usulan masyarakat yang	10	10	15	15	20

			terakomodir dalam APBD					
		Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (Total score penilaian inovasi/jumlah inovasi daerah)	601-610	611-620	621-630	631=640	641=650
		Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabe	Nilai AKIP Bappeda	BB	BB	A	A	A
			Persentase hasil temuan pemeriksaan BPK,Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

- (1) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja program Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat kota, inspektorat Propinsi dan BPK yang ditindaklanjuti, adapun kegiatannya adalah :
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
- (2) Program Pelayanan Administrasi, dengan indikator kinerja program Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah, adapun kegiatannya adalah :
 1. Pengelolaan rumah tangga OPD
- (3) Program Peningkatan Sarana Prasarana, dengan indikator kinerja program Persentase pemenuhan sarana prasarana, adapun kegiatannya adalah :
 1. Pengadaan inventaris kantor
 2. Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor
- (4) Program Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja program Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang , Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang, Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD, adapun kegiatannya adalah :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah
 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD
- (5) Program Kerjasama Pembangunan dengan indikator kinerja program prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR, adapun kegiatannya adalah :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR

- (6) Program pengembangan data dan informasi dengan indikator kinerja program Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan, adapun kegiatannya adalah :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
- (7) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan rencana program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD,RPJMD, dan RKPD. Adapun kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- (8) Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD .adapun kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Lingkungan hidup
 2. Penyusunan Rencana Umum Perumahan permukiman
 3. Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur
- (9) Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kinerja program Persentase keselarasan rencana pemanfaatan ruang dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.adapun kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Tata Ruang
 2. Pengembangan Informasi Geospasial
- (10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan indikator kinerja program Persentase Keselarasan rencana program pembangunan daerah sektor Ekonomi dengan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.adapun kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- (11) Program Pengendalian Pembangunan dengan indikator kinerja program Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatannya adalah :

1. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah

(12) Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerja program Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor, Jumlah kampung tematik/kampung wisata, Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan, Persentase Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat, adapun kegiatannya adalah :

1. Penguatan SIDA Kota Bogor
2. Kajian Lingkup bidang Ekonomi
3. Kajian Lingkup Bidang Pemerintahan
4. Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya
5. Kajian Lingkup Bidang Pembangunan



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN : 2020

SKPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				794.686.000				700.000.000
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				794.686.000				700.000.000
103.31	Perencanaan Tata Ruang				794.686.000				700.000.000
103.40301.31.022	Perencanaan Tata Ruang	Keluaran : Dokumen Laporan Pendampingan Keluaran : Materi Sosialisasi Tata Ruang Keluaran : Dokumen Kinerja Tata Ruang Hasil : Persentase Keselarasan rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 73 %	295.336.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 78 %	200.000.000
103.40301.31.025	Pengembangan Informasi Geospasial	Keluaran : Peta Dasar Mutakhir Keluaran : Simtaru dan Simpul Jaringan Hasil : Persentase Keselarasan rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Bogor	1 Dokumen 1 Sistem 73 %	499.350.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen 0 Sistem 78 %	500.000.000
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				82.690.000				150.000.000
210	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian				82.690.000				150.000.000
210.18	Pengembangan Data dan Informasi				82.690.000				150.000.000
210.40301.18.022	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Keluaran : Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah Keluaran : Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola Keluaran : Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan Hasil : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan Perencanaan dan Pengendalian Serta Evaluasi Pembangunan		1 Buku 1 Naskah 9216 Elemen Data 1 Dokumen 90 Persentase (%)	82.690.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Buku 1 Naskah 9416 Elemen Data 1 Dokumen 90 Persentase (%)	150.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.010.683.100				8.260.000.000
401	Administrasi Pemerintahan				130.327.000				420.000.000
401.20	Kerjasama Pembangunan				34.127.000				120.000.000
401.40301.20.012	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	Keluaran : Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR Keluaran : Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR Keluaran : Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR Hasil : Prosentase program pembangunan daerah yang di danai dari CSR	Kota Bogor	1 Dokumen 3 Kali 1 Dokumen 10 Persentase	34.127.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen 3 Kali 1 Dokumen 10 Persentase	120.000.000
401.21	Pengendalian Pembangunan				96.200.000				300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401.40301.21.009	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	Keluaran : Terselenggaranya Workshop SIPD Keluaran : Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Keluaran : Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD Keluaran : Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020 Hasil : Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah		1 kali 1 Dokumen 2 kali 300 buah 80 %	96.200.000	APBD Kabupaten/Kota		0 kali 0 Dokumen 0 kali 0 buah 0 %	300.000.000
403	Perencanaan				8.880.356.100				7.840.000.000
403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.969.439.850				3.100.000.000
403.40301.01.001	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Keluaran : Honorarium Pegawai PNS Keluaran : Honorarium Pegawai Non Pns (Supir) Keluaran : Belanja Alat Tulis Kerja Keluaran : Pembayaran Listrik Keluaran : Belanja Surat Kabar Keluaran : Pembayaran Air/PDAM Keluaran : Pembayaran Telepon Keluaran : Belanja Makan Dan Minum Rapat Keluaran : Pembayaran STNK Roda 2 Keluaran : Pembayaran STNK Roda 4 Keluaran : Pengadaan Jasa Keamanan Keluaran : Pengadaan Jasa Kebersihan Hasil : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor	12 Bulan 12 Bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 24 Unit 10 Unit 1 paket 1 paket 100 %	2.969.439.850	APBD Kabupaten/Kota		0 Bulan 0 Bulan 0 paket 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 paket 0 Unit 0 Unit 0 paket 0 paket 0 %	3.100.000.000
403.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.662.620.000				1.450.000.000
403.40301.02.001	Pengadaan Inventaris Kantor	Keluaran : Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Keluaran : BM.Pengadaan AC 1/2 PK Keluaran : BM.Pengadaan Komputer PC Keluaran : BM.Pengadaan Printer Keluaran : BM.Pengadaan Server Hasil : Terpenuhinya Inventaris kantor	Jl, Kapten Muslihat No. 21	4 unit 1 unit 3 unit 2 unit 1 unit 0 %	1.001.100.000	APBD Kabupaten/Kota		0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 %	600.000.000
403.40301.02.002	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Keluaran : Renovasi Bappeda Keluaran : Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda Keluaran : Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda Hasil : Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur	Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor	1 paket 1 paket 1 paket 90 % 90 %	661.520.000	APBD Kabupaten/Kota		0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 %	850.000.000
403.03	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				45.479.400				75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40301.03.001	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Keluaran : Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Keluaran : Tersusunnya LKIP Keluaran : Tersusunnya LKPJ Keluaran : Tersusunnya LPPD Hasil : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Hasil : Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	Bappeda Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 70 Point 90 %	45.479.400	APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Point 0 %	75.000.000
403.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				858.759.000				1.080.000.000
403.40301.16.010	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Keluaran : Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan Keluaran : Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan Keluaran : Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota Keluaran : Rekapitulasi Hasil Musrenbang Keluaran : Terlaksananya Forum PD Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Keluaran : Pameran Pembangunan Keluaran : Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Keluaran : Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional Hasil : Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Musrenbang Hasil : Rasio Keterwakilan Anak dalam Musrenbang Hasil : Rasio Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk Hasil : Presentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam APBD		1 dokumen 6 Kecamatan 4 Bidang 1 Dokumen 10 Hari 1 Hari 1 Paket 4 Penghargaan 2 Kali 20 :100 1 :100 6 :10.000 10 Persen	738.900.000	APBD Kabupaten/Kota		0 dokumen 0 Kecamatan 0 Bidang 0 Dokumen 0 Hari 0 Hari 0 Paket 0 Penghargaan 0 Kali 0 :100 0 :100 0 :10.000 0 Persen	780.000.000
403.40301.16.019	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : Rancangan RKPDP Tahun 2021 Keluaran : Peraturan Walikota tentang RKPDP Tahun 2021 Keluaran : Rancangan RKPDP Perubahan Tahun 2020 Keluaran : Peraturan Walikota tentang RKPDP Perubahan Tahun 2020 Keluaran : Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII TA.2021 Keluaran : Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, DII Perubahan TA.2020 Hasil : Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota		8 set 55 Buku 8 set 55 Buku 1 paket 1 paket 22 Angka	119.859.000	APBD Kabupaten/Kota		0 set 0 Buku 0 set 0 Buku 0 paket 0 paket 0 Angka	300.000.000
403.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				174.421.000				195.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40301.17.009	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan	Keluaran : Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor Keluaran : Dokumen Perencanaan Kota Sehat Keluaran : Pembinaan Forum Kota Sehat Hasil : Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan 73 persen	174.421.000	APBD Kabupaten/Kota		0 Dokumen 0 Dokumen 24 bulan 79 persen	195.000.000
403.19	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya				401.928.250				590.000.000
403.40301.19.003	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Keluaran : Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan Keluaran : Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Keluaran : Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan Hasil : Persentase Keselarasan Rencana Program Pembangunan Sosial Budaya dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Hasil : Berkurangnya angka kemiskinan		1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 73 persen 0.5 persen	401.928.250	APBD Kabupaten/Kota		0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 persen 1 persen	590.000.000
403.23	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				1.025.788.800				1.350.000.000
403.40301.23.003	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Keluaran : Dokumen Rencana Induk Utilitas Hasil : Presentase keselarasan rencana pembanguan prasarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Bogor (Jalan Sekunder, Tersier dan lingkungan)	1 Dokumen 73 %	620.000.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen 83 %	750.000.000
403.40301.23.004	Perencanaan Lingkungan Hidup	Keluaran : Dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Hasil : Persentase Keselarasan rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kota Bogor	1 dokumen 73 %	116.373.800	APBD Kabupaten/Kota		1 dokumen 78 %	250.000.000
403.40301.23.005	Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman	Keluaran : Dokumen strategi sanitasi kota Keluaran : Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi Keluaran : Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Hasil : Persentase Keselarasan rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Kota Bogor	1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 73 %	289.415.000	APBD Kabupaten/Kota		1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 77 %	350.000.000
403.24	Penelitian Pengembangan				1.741.919.800				700.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403.40301.24.006	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor	Keluaran : Terlaksananya Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 Keluaran : Gebyar Kreativitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 Keluaran : Terfasilitasinya Jejaring Inovasi Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik Keluaran : Sosialisasi HAKI Inovasi Peserta Lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor Keluaran : Pembuatan Video Inovasi Hasil : Rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Kota Bogor	1 Lomba 1 Acara 1 Jejaring 1 Dokumen 3 sosialisasi 1 Video 1 Dokumen	652.300.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Lomba 1 Acara 1 Jejaring 1 Dokumen 2 sosialisasi 1 Video 1 Dokumen	700.000.000
403.40301.24.007	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	Keluaran : Tersedianya data, informasi dan arah strategis Rencana Aksi Pendapatan Daerah Keluaran : Tersedianya data, informasi dan arah strategis Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Bogor Hasil : Rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	536.877.400	APBD Kabupaten/Kota	Kegiatan Baru		0
403.40301.24.008	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Keluaran : Tersedianya data informasi, dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yg sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat Hasil : Rekomendasi hasil litbang yg ditindaklanjuti jadi kebijakan		1 dokumen 1 dokumen	289.415.000	APBD Kabupaten/Kota			0
403.40301.24.009	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Keluaran : Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor Hasil : Rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Kota Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen	263.327.400	APBD Kabupaten/Kota	Kegiatan Baru		0

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda pada Tahun 2020 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.